

PERAN TU'A GOLO DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL (Studi Etnografis *Gendang* di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Keristian Dahurandi

Abstract

Tu'a golo is the name for the head of beo/gendang (kampong, corresponds to the traditional rural community) within the cultural setting of Manggaraian society, in the East Nusa Tenggara Province. Basically, the main role of tu'a golo is closely related to the traditional system of governance of Manggaraian society which includes: first, mbaru bate kaeng (house of residence), second, uma bate duat (place of work), third, natas bate labar (village yard for socializing and creativity), fourth, wae bate teku (water springs for life), fifth, compang (altar offerings). In the context of Gendang in the District of Langke Rembong, the role of tu'a golo is shifting due to several things: first, the diversity of single activity of the house to plurality of social activities offered by various social institutions; secondly, there is limited space (lingko) to be able to carry out the role of lodok lingko (distribution of land) so that tu'a golo only acts as a witness concerning the boundaries of the ownership of the land when the issue of positive law arises; third, the paradigm shift of thinking of the people because of the development of science and technology which tends to revise the traditional way or cultural approach that is considered traditional.

Key words: tu'a golo, social change

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manggarai adalah daerah/suku yang terletak di bagian Barat Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar masyarakat masih tinggal secara sporadik atau terpisah-pisah dalam bentuk *beo/golo* (kampong). Setiap *beo* memiliki pemimpin tertinggi yang mengendalikan, mengatur dan memimpin warganya yang disebut *tu'a golo* (kepala kampong). Kata *tu'a* bisa mengacu pada usia dan sebutan untuk orang yang "dituakan" dalam kehidupan masyarakat, sedangkan *golo* dipakai untuk menyebut wilayah

kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pemimpin (Nggoro, 2013:78). Dengan demikian, term *tu'a golo* digunakan untuk menyebut orang yang mengepalai suatu kampung dan wilayahnya (*gendang one linkon peang*).

Seiring perguliran waktu, peran kepemimpinan *tu'a golo* dalam sistem sosial budaya Manggarai tampak mengalami perubahan. Verheijen (dalam Nggoro, 2013:75), mengafirmasi perubahan peran ini terjadi sejak masuknya arus modernisasi tahun 1907. Dalam sejarah, modernisasi dilihat sebagai jalan mulus terbentuknya eksistensi bangsa Indonesia dari serpihan kerajaan yang tersebar di antara Sabang dan Merauke, namun ia juga dapat merobek otonomitas budaya yang sedikit monadistis dalam sistem kerajaan. Anak pinak dari arus modernisasi antara lain perubahan sistem organisasi tradisional (kultural) dengan format sistem organisasi modern, sistem pemerintahan feodal dengan sistem demokratis. Bersamaan dengan itu pula *tu'a golo* sebagai bagian dari sistem sosial tradisional perlahan-lahan berubah. Secara historis, perubahan ini mulai terasa sejak masuknya misionaris di tanah Manggarai pada tahun 1915.

Perubahan peran *tu'a golo* sebagai proses adaptasi arus modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk dialektika budaya yang tersirat kristalisasi pola pikir, cipta dan rasa. Secara teoretis, perubahan disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu evolusi dan revolusi. Istilah evolusi dikenakan pada proses perkembangan perlahan-lahan dari hal yang kurang sempurna menuju hal yang lebih sempurna (evolusi unilinear), perubahan dari yang homogen ke heterogen (evolusi multilinear) dan perubahan sesuai cara dan arah yang khas dan berbeda satu sama lain (evolusi multiarah). Sedangkan istilah revolusi mengacu pada perubahan yang terjadi serentak, radikal dan menyeluruh (Ganggu dan Satu, 2011:9.9-9.10).

Bercermin pada realitas yang selalu berubah-ubah, budaya Masyarakat Manggarai juga turut mengalami perubahan. Dedy,dkk (2017:5) dalam uraiannya tentang "Ritus Budaya Manggarai" menegaskan bahwa budaya Manggarai telah ikut berubah seiring perubahan sistem berpikir masyarakat dan globalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendokumentasian sebelum perubahan itu jauh dari keasliannya melalui penelitian budaya. Terinspirasi oleh fakta sosial budaya tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam fenomena perubahan dalam budaya Manggarai khususnya peran *tu'a golo* dalam konteks kehidupan sosial budaya masyarakat Manggarai

melalui penelitian berjudul: "PERAN *TU'A GOLO* DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL (Studi Etnografis *Gendang* di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur).

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran *tu'a golo* di *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana proses pemberian peran *tu'a golo* dalam kehidupan masyarakat *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apa saja faktor pendorong peran *tu'a golo* dalam kehidupan masyarakat *Gendang* di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Dideskripsikan bentuk peran *tu'a golo* di *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dideskripsikan proses pemberian peran *tu'a golo* dalam kehidupan masyarakat *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dideskripsikan faktor pendorong peran *tu'a golo* dalam kehidupan masyarakat *Gendang* di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) berikut:

1. Lembaga Stipas St. Sirilus Ruteng

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga untuk mempersiapkan agen pastoral yang bermelek

budaya agar mampu mengimplementasikan kegiatan pastoral kontekstual secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah teologi kontekstual sebagai “modal kompetensi kultural” bagi calon agen pastoral.

2. Gereja Keuskupan Ruteng

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Gereja lokal keuskupan Ruteng tentang reksa pastoral dalam kehidupan masyarakat Manggarai “kekinian” (Manggarai zaman now) bukan pastoral yang didasari oleh “Manggarai Jadul”. Salah satu fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri adalah perubahan sosial. Karena pastoral kontekstual tidak hanya mencari akar budaya zaman lampau yang hanya dihidupi oleh masyarakat zamannya, tetapi mencari nilai budaya yang sedang mengalami perubahan.

3. Pemerintah Kabupaten Manggarai

Penelitian ini hendak memberikan *input* (masukan) bagi pemerintah bahwa perangkat-perangkat adat terutama *tu’agolo* adalah salah satu kearifan lokal yang adalah kristalisasi nilai-nilai organisasi kultural. Dengan meneliti peran *tu’agolo* dalam konteks budaya Manggarai, pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan konsep administrasi pemerintahan kontekstual dengan memberi peran pada perangkat kultural dalam menjalankan roda pemerintahan.

4. Peneliti lain

Penelitian ini hendaknya dapat menjadi landasan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terutama untuk menganalisis dan memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan kehidupan Masyarakat Manggarai sebagai rumah kehidupan bersama. Dengan kata lain, membangun Manggarai “zaman now” harus bertolak dari substansi perubahan yang sedang terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Uraian pada bagian ini mencakup dua pokok utama yaitu *tu’agolo* sebagai pemimpin kampung (*beo/gendang*) dalam struktur budaya Manggarai dan perubahan sosial sebagai realitas kehidupan manusia yang selalu mengalir (*panta rhei*) dalam dimensi ruang dan waktu. Dua entitas tersebut

dianalogikan sebagai teks dan konteks. Entitas peran *tu'a golo* sebagai "teks" selalu mengalir dalam "konteks" perubahan sosial kehidupan masyarakat. Berikut uraian tentang kedua pokok ini.

1.1. PERAN TU'A GOLO

Tu'a golo adalah pemimpin tertinggi (*top leader*) setiap kampung (*beo/gendang/golo*). Sebagai pemimpin tertinggi, *tu'a golo* tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola kehidupan masyarakat kampung. Untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, *tu'a golo* dituntut untuk memiliki kualitas diri tertentu agar dia mampu mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan semua tata hidup dan norma budaya yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, pada bagian ini kita perlu mengenal peran *tu'a golo* dalam perspektif budaya Manggarai.

1.1.1. Terminologi *Tu'a Golo*

Term *tu'a golo* terbentuk dari kata *tu'a* dan *golo*. *Tu'a* berarti ketua, kepala, pemimpin; dan *golo* berarti bukit, gunung, keris. Kata *tu'a* adalah kata yang dikonversi dari *ata tu'a* (orang tua atau orang yang dituakan) sedangkan kata *golo* berpadanan makna dengan kata *beo* (kampung) (Janggur, 2008:226). Sebutan *golo* terlahir dari konteks pemukiman masyarakat Manggarai yang menempati wilayah puncak gunung (*golo*) dengan tujuan untuk terhindar dari serangan musuh (Verheijen, 1991:23). Dengan demikian, term *tu'a golo* dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi kampung (*beo/golo*) yang diangkat dan dipercayakan untuk mengkoordinasi, mendorong, memotivasi warganya (*wau*) untuk melaksanakan cita-cita bersama.

Sebutan *tu'a golo* merupakan atribut ajektif untuk pemimpin tertinggi dalam struktur sosial *wa'u* (keturunan) yang tinggal dalam satu *beo* sebagai satuan pemukiman yang bersifat unilokal. Warga *wa'u* adalah keluarga kerabat yang terbentuk berdasarkan sistem patrilinear (garis keturunan ayah). *Wau* yang pertama kali membentuk atau mendiami kampung memiliki privilese (*previllage*) atau hak istimewa dalam hal kepemilikan tanah ulayat (*lingko*). Mereka dianggap sebagai *ata ici tana* (penduduk asli). Pandangan *ici tana* semakin kuat berpengaruh dalam konteks keberadaan pluralitas klan yang menghuni kampung atas

dasar ikatan perkawinan (*dongge mata one*) atau mencari nafkah (*long*). Pemimpin setiap suku/klan pengikut *ata ici tana* adalah *tu'a suku/tu'a panga* (Janggur, 2008:226). *Tu'a panga* dari keturunan penduduk pertama (*ata ici tana*) akan menjadi *tu'a golo*.

Dengan demikian, *tu'a golo* berarti orang yang mengepalai struktur sosial adat suatu kampung yang di dalamnya terdiri atas berbagai suku atau klan. Ia mengatur kebijakan kehidupan bersama, terutama mengatur pola hubungan suku atau klan tersebut dalam masyarakat, menyelesaikan masalah bersama *tu'a-tu'a* setiap klan (*tu'a panga*) dan mengatur pola hubungan keluar dengan *gendang/beo/golo* lain. Ia memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kampung, batas-batas tanah (*lingko*) dan jumlahnya, sejarah keberadaan *golo* dan legalitas atas kehidupan kampung (*golo*) seluruhnya.

1.1.2. Asal-usul Istilah *Tu'a Golo*

Asal-usul *tu'a golo* tidak terlepas dari sejarah keberadaan kampung (*golo/beo*). Setiap *golo* mempunyai historisitas genealogisnya. Menurut cerita lisan masyarakat Manggarai, ada beberapa proses pembentukan kampung atau *golo*, antara lain: *pertama*, sistem perkebunan yang berpindah-pindah yang berujung pada pembentukan pemukiman; *Kedua*, terlahir dari proses kosmogonis bukti kedekatan dengan alam (*kosmos*) yang tergambar dalam mitos seekor anjing yang dengan penciumannya mengetahui letak air di bawah tanah yang menjadi cikal bakal pendirian pemukiman. *Ketiga*, proses mitologis seperti terungkap dalam cerita tentang keberadaan leluhur (*empo*) yang berasal dari rumpun bambu (*belang*) sehingga muncul idiom budaya Manggarai, "*ata bengkar one mai belang* (orang yang terlahir dari bambu)"; *Keempat*, proses translokasi yang biasanya terjadi karena adanya bencana alam seperti longsor (*rone le lus*), wabah penyakit (*nemba/mata mempo*), dan lain-lain (Deky, 2011:143-158).

Apapun proses pembentukan *golo* (*beo*), sebuah keniscayaan adalah keberadaan seorang anggota masyarakat yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin (*top leader*) untuk mengkoordinasi lalu lintas kehidupan masyarakat. Sebutan pemimpin setiap kampung adalah *tu'a golo*. Sejak awal, *tu'a golo* pun membagi perannya dalam mengurus kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *tu'a golo* menunjuk *tu'a teno* untuk

membagi tanah (menentukan batas-batasnya) kepada masyarakatnya (*lodok lingko*). Selain itu, untuk mewakili *wa'u* (keturunan) yang kian hari terus berkembang, *tu'a golo* juga mengangkat *tu'a panga*. Dalam arti tertentu, *tu'a golo* adalah pemimpin klan yang tertua (*ata ici tana*) dan memiliki kewenangan yang lebih luas dari semua *tu'a* (pemimpin) yang ada dalam kehidupan sosial kampung (Nggoro, 2013:78).

Lingkar kekuasaan ke-*tu'a-golo*-an diungkapkan dengan istilah khas dalam budaya masyarakat Manggarai "*gendang onen lingkon pe'ang* (rumah adat sebagai pusat kekuasaan dan kebun sebagai batas wilayah). Istilah ini hendak menegaskan bahwa *tu'a golo* memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk mengurus semua persoalan kehidupan warganya yang melibatkan tetua adat lain, seperti *tu'a teno* dan *tu'a panga*. Itulah sebabnya penggunaan kata *golo* dalam ungkapan *tu'a golo* berpadanan makna dengan kata *beo* (kampung) sehingga *tu'a golo* sering pula disebut *tu'a beo*.

1.1.3. Bentuk-Bentuk Peran *Tu'a Golo*

Peran *tu'a golo* dalam sistem sosial budaya masyarakat Manggarai tidak terlepas dari konsep pemerintahan tradisional Manggarai, yaitu *pertama, mbaru bate kaeng* (rumah tempat tinggal); *kedua, uma bate duat* (kebun-*lingko* tempat bekerja); *ketiga, natas bate labar* (halaman kampung untuk bersosialisasi dan berkreasi); *keempat, wae bate teku* (mata air tempat timbaan); *kelima, compang bate dari* (altar persembahan). Pengaturan kelima hal tersebut merupakan peran awaliah *tu'a golo* (Deky, 2011:70). Untuk memudahkan uraian peran dasar tersebut, penulis mengelompokkannya ke dalam tiga peran sistem pemerintahan modern ala Hobbes yang dilanjutkan oleh Montesque (1748) yaitu *tu'a golo* sebagai pemimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif. Apabila dalam sistem politik modern, ketiga peran tersebut dijalankan oleh lembaga dan orang yang berbeda, dalam kepemimpinan tradisional Manggarai, ketiga peran tersebut dapat dipegang oleh *tu'a golo*.

1.1.1.1. Peran *Tu'a Golo* sebagai Pemimpin Legislatif

Peran legislatif adalah peran untuk menetapkan norma atau hukum yang dapat mengatur kehidupan bersama. Norma atau hukum diadakan untuk mengatur hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil, teratur, dan

seimbang. Untuk itu, norma atau hukum mesti disertakan dengan hadiah dan sanksi agar dapat mengikat semua subyek hukum (masyarakat). Anggota yang melanggar norma akan diberi sanksi dan masyarakat yang melaksanakan tindakan sesuai norma /hukum patut mendapat pujian/hadiah. Muara akhir hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara jasmaniah dan rohaniah.

Peran legislasi yang dijalankan *tu'a golo* diungkapkan dengan istilah "*ata bisa*" (orang mampu) atau *ata kop mane agu gula* (bijak atau hidupnya serasi dan seimbang sesuai hukum yang berlaku). Kedua kompetensi inilah yang dapat menjadi modal dasar bagi *tu'a golo* untuk menjadi fasilitator musyawarah untuk mufakat termasuk penetapan aturan atau norma. Norma-norma yang utama yang ditetapkan oleh *tu'a golo* berkaitan erat dengan kelima sistem pemerintahan tradisional tadi. *Tu'a golo* dapat memimpin musyawarah untuk menetapkan norma kehidupan berumah tangga sehingga ada sebutan *neka lage alu/ neka lengga wakas* (tidak boleh melanggar hak dan kewajiban) yang sanksinya seperti *taro loma, denda ela wase lima* (materi yang dibebankan kepada pelaku kepada korban sebagai penyembuh luka) (Janggur, 2008:198-199). Pusat proses legislasi tersebut penetapan norma tersebut adalah *mbaru gendang* (rumah adat) sehingga *tu'a golo* dalam arti tertentu disebut *tu'a gendang*.

Peran legislasi juga terdapat dalam aktivitas *tu'a golo* untuk mengurus kepemilikan lahan *lingko* (wilayah) yang biasa didelegasikan kepada *tu'a teno* (ketua pembagian tanah) dan penetapan momen-momen ritual budaya, rekreasi atau permainan budaya untuk mewujudkan filosofi *natas bate labar*, penetapan aturan penggunaan mata air timbaan (*wae bate teku*) yang disebut *langi/koing* (sapaan), dan aturan penggunaan *compang* (altar persembahan) yang biasanya terletak di tengah kampung. Semua penetapan norma tersebut terjadi secara mufakat (*loto leok*) pada rumah adat (*mbaru gendang*). Inilah alasan yang menjadikan *mbaru gendang* berada di tengah perumahan yang lain.

Singkatnya, *tu'a golo* berperan penting dapat memfasilitasi dan menetapkan norma atau hukum untuk menata kehidupan masyarakat yang mencakup tempat tinggal, kebun tempat bekerja dan mata air tempat timbaan masyarakat (Deki, 2011:69).

1.1.1.2. Peran *Tu'a Golo* sebagai Pemimpin Eksekutif

Peran eksekutif adalah peran untuk melaksanakan program yang ditetapkan bersama melalui musyawarah. Peran eksekutif yang dijalankan *tu'a golo* tercermin dalam tugas dan tanggungjawabnya untuk memimpin upacara ritual, menggerakkan *dodo* (bekerja gotong royong) untuk menjamin ketersediaan sumber makanan, memimpin bakti sosial bersama, dan berbagai kegiatan untuk menata kehidupan yang mencakup *gendang one, lingkon peang*. Atas perannya itu, *tu'a golo* juga sering disebut sebagai *ata lami rangga pede* (penjaga tanduk warisan). *Rangga pede* (tanduk warisan) selalu ditempatkan di atas atap rumah adat (*mbaru gendang*) sehingga sebutan ini menyiratkan makna bahwa seorang *tu'a golo* berperan sebagai kepala *mbaru gendang* (Bustan,2010:30).

Tugas dan tanggung jawab utama *tu'a gendang* adalah memelihara kaidah budaya warisan leluhur agar tetap hidup dan berkembang sesuai substansi sebenarnya guna dapat diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikut (*pedeng dise ende agu tae dise ame*). Tugas ini pula terungkap dalam ungkapan yang berbunyi: *eme wakak betong asa, manga waken nipu tae* (jika bambu tua sudah terjungkal, masih ada akar yang memelihara keberadaanya). Kata *wakak* (jatuh terjungkal) berarti meninggal dunia, *betong asa* (bambu tua) menunjuk pada leluhur atau nenek moyang sebagai pengasal atau pelahir pertama *wa'u* bersangkutan, dan kata *wake* (akar) mengacu seluruh keturunannya.

Peran eksekutif *tu'a golo* juga terungkap dalam ungkapan *toto ata kop, toing ata di'a* (menunjukkan yang pantas, mengajarkan yang baik) sebagai ejawantah dari konsep hukum *ata kop gula agu mane* (hidupnya selaras antara tindakan dan norma). Ungkapan ini menggambarkan *tu'a golo* sebagai representasi pemimpin bijak yang patut diteladani dan dengan itu pula menjadi pengayom seluruh warga *wa'u*. Atas dasar itu, dia juga pantas disebut sebagai *ata nipu pa'ang olo, ngaung musi* (yang mengetahui seluruh warganya). Itu berarti, seorang *tu'a golo* harus memahami kehidupan warganya secara holistik baik aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keamanan warga *wa'u* dalam konteks relasi internal dan eskternalnya agar terwujud masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

1.1.1.3. Peran *Tu'a Golo* sebagai Pemimpin Yudikatif

Peran yudikatif yang diperankan *tu'a golo* terwujud dalam kemampuannya untuk menjaga supremasi atau kewibawaan hukum atau norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, dia biasa disebut sebagai *ata nipu olon agu musin* (penjaga norma). Cakupan tugas dan tanggungjawab *tu'a golo* sebagai pemimpin yudikatif dapat dilihat dan disimak dalam ungkapan *wae nggereng*, (air bersih/jernih). Ungkapan ini menunjukkan, bahwa *tu'a golo* diakui sebagai orang yang berhati bening atau bersih. Dalam menyelesaikan konflik sosial antarwarga *wa'u*, *tu'a golo* dipercaya sebagai orang yang mampu mengambil keputusan yang adil, dan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dialami masyarakat (*nggereng*) (Bustan, 2010:30). Bidang yang dijaga *tu'a golo* dalam hal yudikasi adalah memecahkan persolanan relasi antar individu dalam kampung, menjaga kepemilikan tanah ulayat, dan menjaga etika saat membutuhkan tempat mata air (*gendangn one, lingkon peang, wae bate teku, uma bate duat, nata bate labar dan compang bate dari*).

Pada umumnya, pendekatan yang dilakukan *tu'a golo* dalam proses penyelesaian konflik sosial berasaskan perdamaian (*hambor*)(Janggur, 2008:199). Basis argumentasi yang menjadi latar pikir adalah konflik antarwarga dalam satu *wa'u* terjadi karena kelalaian *tu'a golo* sebagai pemimpin dalam mengayomi dan mengelola kehidupan mereka secara efektif. Karena konflik yang dilakukan lebih dapat merusak hubungan sosial masyarakat umum daripada hubungan pribadi yang bermasalah. Langkah penyelesaian yang dipandang aman adalah kedua belah pihak yang terlibat konflik sama-sama dinyatakan menang, karena selain berasal dari satu garis keturunan darah yang sama, mereka juga berasal dari satu *mbaru gendang* yang sama ketika mereka masih hidup dalam pola *kilo hang neki* (*extended family*). Selama hidup bersama dalam satu *mbaru gendang*, mereka makan makanan dari satu periuk (*lewing*) dan menggunakan *kebor* (irus) yang sama untuk mencedok (*kobe*) makanan, sehingga konflik itu disebut dengan istilah *rintuk tau lewing agu kebor* (saling bertabrakan antara periuk dan irus) yang adalah konflik internal, sehingga konflik itu tidak perlu dilanjutkan atau dibesar-besarkan agar tidak merusak citra dan nama baik warga *wa'u* secara keseluruhan.

Sekalipun demikian, pelanggaran yang dilakukan warga masyarakat terhadap norma yang berlaku memiliki tingkatan yang berbeda satu

sama lain. Berhadapan dengan hal tersebut, *tu'a golo* juga berhadapan dengan penyelesaian masalah yang disertai sanksi atau denda berupa materi. Hal ini diungkapkan dengan istilah *wunis agu tahang* (kunyit dan kapur sirih). Sebutan tersebut bermakna bahwa denda tersebut dianggap sebagai simbol perdamaian untuk mengobati luka dan darah yang tumpah tatkala ada korban fisik. *Wunis agu tahang* biasanya dinyatakan dalam bentuk pemberian hewan seperti ayam, kambing atau babi dari pelaku kepada pihak korban. Ungkapan lain adalah *emi kole muu daat* yang berarti menarik kembali kata-kata kasar atau tidak senonoh yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pemberian ayam oleh pelaku kepada korban (Janggur, 2008:198-199).

1.2. PERUBAHAN SOSIAL

Tu'a golo adalah salah satu perangkat struktural tatanan masyarakat adat Manggarai yang mengalir dalam konteks. Secara filosofis, konteks selalu berubah-ubah meskipun ada yang tinggal tetap yang padanya dapat mengetahui perubahan tersebut. Dalam konteks era globalisasi, perubahan adalah suatu keniscayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Atas kesadaran perubahan konteks tersebut, maka suatu kepastian bahwa semua budaya yang adalah endapan hasil cipta, rasa dan karsa manusia selalu mengalami perubahan. Lalu, bagaimana budaya Manggarai, khususnya peran *tu'a golo* dalam menapaki derasnya arus perubahan sosial tersebut? Untuk itu, kita mesti memahami hakekat perubahan sosial.

1.2.1. Batasan Perubahan Sosial

Kingsley Davis (dalam Soekanto dan Sulistiowati, 2002: 27) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Lebih lanjut, Gillin dan Gillin (dalam Soekanto dan Sulistiowati, 2002:27) mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan tersebut menurut Maclver didasari oleh adanya *utilitarian elements* dan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Kedua hal dasar tersebut dapat mempengaruhi semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai

kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.

Berkaitan dengan proses perubahan sosial, Talcott Parsons (dalam Narwoko dan Suyanto, 2004:350) mengatakan bahwa masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional dari tingkat dasar ke tingkat paling atas. Tiga tingkatan utama perkembangan masyarakat transisional tersebut adalah primitif, intermediet dan modern. Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi kedalam subklasifikasi evolusi sosial yang terdiri dari lima tingkatan, yaitu primitif, *advanced primitive and archaic*, *historis intermediet*, *seedbedsociaties* dan *modern sociaties*. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman(integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi). Thorstein Veblen (dalam Narwoko dan Suyanto, 2004:350) juga menambahkan teknologi sebagai faktor determinan dalam perubahan sosial sehingga teknologilah yang mewarnai tatanan sistem sosial.

Beberapa pendapat di atas hendak menegaskan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan hilang dan munculnya suatu struktur dan fungsi dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya ada menjadi tidak ada atau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang mencakup perubahan sistem berpikir dan sistem teknologi dalam mempertahankan peradaban masyarakat.

1.2.2. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Secara umum, faktor utama penyebab perubahan sosial dalam masyarakat adalah cara lama sudah tidak dapat memuaskan atau tidak mampu melayani proses pemenuhan kebutuhan manusia. Narwoko dan Suyanto (2004:351) berpendapat bahwa perubahan sosial disebabkan oleh adanya perbaikan dan penemuan yang berasal dari situasi internal masyarakat karena adanya: *pertama*, bertambah atau berkurangnya penduduk; *kedua*, penemuan-penemuan baru; *ketiga*, pertentangan-pertentangan; *keempat*, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sedangkan penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat antara lain: *pertama*, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, *kedua*,

peperangan dengan negara lain, *ketiga*, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Hampir sama dengan pendapat di atas, Soekanto dan Sulistiowati (2002:330) juga mengemukakan beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan, antara lain: *pertama*, kontak dengan kebudayaan lain, *kedua*, sistem pendidikan yang maju, *ketiga*, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, *keempat*, toleransi terhadap perbuatan menyimpang, *kelima*, sistem masyarakat yang terbuka, *keenam*, penduduk yang heterogen, *ketujuh*, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, *kedelapan*, orientasi ke depan, *kesembilan*, nilai meningkatnya taraf hidup. Selain itu, mereka juga menambahkan faktor penghambat terjadinya perubahan adalah: *pertama*, kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, *kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, *ketiga*, sikap masyarakat yang tradisional, *keempat*, adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, *kelima*, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, *keenam*, prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing, *ketujuh*, hambatan ideologis, *kedelapan*, kebiasaan, *kesembilan*, nilai pasrah.

Proses perbuahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan (adaptasi), saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegrasi) dan reorganisasi (reintegrasi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma dan nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

Selanjutnya, Ganggu dan Satu (2011:9.2-9.3) mengemukakan adanya tiga inovasi kultur yang utama yang menyebabkan perubahan sosial, yaitu *pertama*, penemuan (*discovery*), yaitu satu persepsi baru dari satu aspek dari realitas yang telah ada; *Kedua*, perbaikan atau penyempurnaan (*invention*), yaitu satu kombinasi atau penggunaan baru dari pengetahuan yang telah ada untuk menghasilkan sesuatu yang belum ada sebelumnya;

ketiga, penyatuan (*diffusion*), yaitu penyebarluasan elemen-elemen kultur dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Difusi dapat terjadi oleh banyak faktor seperti perjalanan perdagangan, penjajahan, migrasi atau telekomunikasi.

1.2.3. Beberapa Teori Perubahan Sosial

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori fungsionalisme struktural sebagai teori utama untuk menganalisis tentang peran *tu'a golo* dalam konteks perubahan sosial. Teori ini membantu peneliti untuk meneliti bagian-bagian dalam masyarakat yang dapat mendorong langgengnya peran *tu'a golo* karena setiap bagian merupakan satu-kesatuan yang utuh dengan bagian yang lainnya dalam struktur sosial masyarakat. Selain itu, peneliti mengambil teori konflik dan teori pembangunan modern yang terdapat dalam teori evolusi dan revolusi untuk menjelaskan perubahan modern yang terarah pada satu tujuan (*telos*) yaitu masyarakat industri. Berikut uraian beberapa teori tersebut.

1.2.3.1 Teori Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme dikembangkan oleh Talcott Parsons, Emile Durkheim, Robert Merton. Ia dipakai untuk analisis level makro. Fungsionalisme struktural menekankan pada persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah sistem untuk terus bertahan, kecenderungan masyarakat menciptakan konsensus (kesepakatan) antar anggotanya dan kontribusi peran dan status yang dimainkan individu/institusi dalam keberlangsungan sebuah masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2007:118).

Selanjutnya, Parsons (dalam Ritzer dan Goodman, 2007:121) juga mengemukakan empat persyaratan fungsional masyarakat, yaitu adaptasi, *goal attainment*, integrasi dan *latency*. Adaptasi ditujukan untuk memperoleh sumber daya yang memadai dari lingkungan sekitar dan mendistribusikan ke seluruh sistem. *Goal attainment* ditujukan untuk menformulasikan tujuan utama dari suatu sistem/masyarakat. Integrasi dipahami sebagai upaya mengkoordinasikan, mengatur hubungan

antar elemen dan sistem. *Latency* (nilai-nilai kolektif) diantaranya pendidikan, agama dan keluarga berperan mentransfer nilai kolektif yang dibutuhkan untuk kelangsungan masyarakat, melalui proses sosialisasi, institusionalisasi dan internalisasi.

1.2.3.2. Teori Konflik

Teori konflik dikembangkan oleh berbagai tokoh sosiologi seperti Karl Marx, W.E.B. Du Bois, C.W. Wright untuk menganalisis level makro. Tetapi perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Karl Max (1818 – 1883) yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dan sejarah. Dia mengatakan: "conflict leads not only to ever-changing relations within the existing social structure, but the total social system undergoes transformation through conflict (Cosser, 2011:200)

Teori konflik sering dianggap sebagai teori yang muncul dari asumsi wajah masyarakat yang tegang dan keras (Poespowardojo dan Seran, 2016: 37-38). Perspektif konflik berasumsi bahwa tingkah laku sosial dipahami dalam kerangka ketegangan atau konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing (dalam keluarga, politik, agama, pendidikan, media, dll). Konflik tidak selalu terjadi dalam bentuk kekerasan tapi juga dalam manipulasi ideologi/hegemoni. Keteraturan sosial dipertahankan melalui kekerasan. Bilamana para fungsionalis melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan, maka para teoritis konflik melihat masyarakat sebagai berada dalam konflik yang terus menerus di antara kelompok dan kelas.

Para teoritis konflik mempertanyakan asumsi para teoritis fungsional yang menyatakan bahwa keseimbangan yang serasi bermanfaat bagi setiap orang. Menurut teoritis konflik, keseimbangan itu menguntungkan orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu dan pada saat yang sama merugikan yang lain. Mereka mengklaim bahwa nilai-nilai bersama yang dilihat oleh para fungsionalis sebagai satu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar suatu konsensus yang benar; sebaliknya konsensus tersebut adalah ciptaan kelompok atau kelas yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang.

1.2.3.3. Teori Evolusi

Teori evolusi terdiri dari tiga jenis, yaitu teori evolusi unilinear (*unilinear theories of evolution*), teori evolusi universal (*universal theories of evolution*) dan teori evolusi multiarah (*multilined theories of evolution*) (Ganggu dan Satu, 2011:9.9-9.10).

Pertama, teori evolusi unilinear. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia (termasuk kebudayaannya) berkembang sesuai dengan tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks sampai kepada bentuk yang lebih sempurna. Yan Robertson memberikan 6 tahap dalam sejarah perkembangan masyarakat yang mulai dengan bentuk yang paling sederhana sampai kepada bentuk yang paling kompleks dan sempurna yaitu: 1) Masyarakat Pemburu dan Peramu; 2) Masyarakat Hortikulturalisme (Pekebun); 3) Masyarakat Agrikulturalisme (Pertanian); 5) Masyarakat Industrialisme (Industri); 6) Masyarakat Post-Industrialisme. Pelopor-pelopor teori ini terutama August Comte dan Herbert Spencer. Satu variasi dari teori ini adalah *cyclical theories* yang dipelopori oleh Vilfredo Pareto. *Cyclical theories* menegaskan bahwa tahap perkembangan masyarakat itu tidak terjadi secara unilinear (satu garis lurus ke depan) tetapi secara siklis yaitu secara melingkar, di mana satu tahap tertentu dilalui secara berulang.

Kedua, teori evolusi universal. Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu dan harus mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu dan harus secara berurutan. Ada satu macam hukum bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen, tidak saja dalam sifat tetapi juga dalam susunannya. Teori ini dipelopori terutama oleh Herbert Spenser.

Ketiga, teori evolusi multiarah. Kata "multilined" berarti banyak garis atau arah dan dipakai persis bertentangan dengan "unilinear" dalam unilinear theoris of evolution. Kalau para pendukung teori unilinear evolusi mengatakan bahwa perkembangan-perkembangan satu masyarakat terjadi dalam satu arah-satu garis dan menjadi hukum yang universal untuk segala jenis perkembangan atau perubahan. Para pendukung teori multilinear evolusi sebaliknya mengatakan bahwa

perubahan-perubahan itu terjadi dengan bermacam-macam cara dan tidak harus mengikuti jalan, arah dan kecepatan yang sama pada setiap masyarakat.

1.2.3.4. Teori Revolusi

Revolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi serentak dan radikal dan menyeluruh. Biasanya perubahan-perubahan semacam ini direncanakan lebih dahulu walaupun bisa juga tak direncanakan. Menurut Ganggu dan Satu (2011:9.11-9.12) revolusi hanya terjadi melalui syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, harus ada situasi yang tidak memuaskan dan ada keinginan semua untuk mengatasinya; *kedua*, adanya seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat setempat; *ketiga*, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat dan mampu merumuskannya dan menegaskan ketidakpuasan tadi ke dalam program dan arah gerakan; *keempat*, pemimpin tersebut di samping mampu merumuskan sesuatu yang abstrak dalam bentuk perumusan ideologi atau visi, dia juga harus mampu menunjukkan tujuan yang konkrit yang dapat dilihat oleh masyarakat;

Kelima, harus ada "momentum" dalam arti saat atau kondisi yang tepat untuk memulai satu gerakan; *keenam*, ketidakpuasan yang menyebar luas; *ketujuh*, harus ada satu kesadaran yang menyebar luas sumber-sumber yang berharga, seperti kekayaan, dan kekuasaan di distribusikan secara tidak merata dan adil; *kedelapan*, kecuali kalau bagian terbesar dari rakyat merasakan satu keluhan atau ketidakpuasan yang terus-menerus; *kesembilan*, harapan-harapan yang muncul. Rakyat harus sadar bahwa ada alternatif untuk sistem yang ada. Kemiskinan dan penindasan itu sendiri tidak bisa melahirkan satu revolusi. Kalau benar maka dunia menjadi panggung revolusi karena bahagian terbesar dari penduduk dunia terdiri dari orang miskin dan tertindas;

Kesepuluh, revolusi pada umumnya terjadi dalam konteks munculnya harapan-harapan. Rakyat yang telah menerima situasi di masa lampau harus merasa bahwa haknya untuk mempunyai sesuatu yang lebih baik di masa depan; *kesebelas*, terhalangnya perubahan alternatif. Saluran-saluran alternatif untuk perubahan harus dihalangi dan kelompok penting dalam masyarakat harus merasa bahwa mereka tidak memiliki

akses kepada kekuasaan. Revolusi-revolusi lebih mungkin terjadi kalau penguasa-penguasa menolak untuk menerima perubahan atau membuat proses perubahan berjalan terlalu lambat sambil menekan usaha-usaha kelompok lain untuk membuat perubahan;

Kedua belas, kehilangan legitimasi. Institusi-institusi yang ada biasanya harus lemah atau malah berada di pinggir kejatuhan. Elit-elit penguasa dalam situasi-situasi pra-revolusi sering terpecah. Sistem gagal berfungsi dan legitimasi bentuk pemerintahan sedang terkikis sehingga sistem dijalankan dengan paksaan; *ketigabelas*, perpecahan militer. Perpecahan alat militer negara harus terjadi dengan akibat kekuatan-kekuatan bersenjata tidak dapat atau tidak akan dapat menekan pergolakan. Dalam kenyataannya seringkali terjadi anggota militer bertukar pihak dan mengikuti para pemberontak dengan rupa-rupa alasan.

1.3. KERANGKA BERPIKIR

Perubahan sosial berkaitan dengan aneka perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan perubahan ini adalah lingkungan fisik, inovasi kultur, populasi dan teknologi. Lingkungan fisik dapat membuat perubahan sosial terutama berhubungan dengan pedesaan dan perkotaan. Inovasi kultur berupa teknologi yang semakin canggih pula dapat mempengaruhi perubahan sosial seperti mesin industri. Populasi masyarakat juga turut mempengaruhi perubahan sosial karena semakin tinggi populasi semakin cenderung untuk berinovasi dan bermigrasi. Semakin mutakhir teknologi yang dipakai, inovasi pun semakin gampang ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

Tu'a golo adalah identitas masyarakat tradisional yang memiliki peran penting dalam penataan kehidupan sosial masyarakat. Sekalipun demikian, tatanan masyarakat tradisional sudah mulai diambil alih oleh sistem pemerintahan modern sejak Indonesia merdeka. Pengaruh paradigma pembangunan modern yang melihat masyarakat Industri sebagai puncak peradaban pun dapat menjadi narasi tunggal (*grand narrative*). Pandangan *grand narratives* ini dikemukakan Lyotard sebagai kritik terhadap narasi induk Marx (Sarup, 2011:255) yang cenderung mereduksi perkembangan

masyarakat pada satu tujuan (*telos*) yaitu dari tradisional kepada industri. Hal ini berdampak pada kelunturan peran *tu'a golo* dalam tatanan kehidupan masyarakat Manggarai.

Atas dasar itu, peneliti hendak meneliti sejauh mana peran *tu'a golo* dalam perubahan sosial melalui bantuan beberapa teori yaitu teori fungsionalis struktural untuk membantu peneliti mengamati perubahan peran *tu'a golo* dalam konteks struktur sosial masyarakat tradisional Manggarai. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan teori perubahan evolusi dan revolusi untuk menelisik perubahan baik yang perlahan-lahan maupun perubahan serentak dalam kaitan dengan peran *tu'a golo* sebagai fungsionaris budaya masyarakat Manggarai.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) obyek yang diteliti. Disebut juga sebagai metode etnografi (Sugiyono, 2010:14). Berdasarkan pengertian di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran *tu'a golo* yang berada di Gendang-gendang yang ada di wilayah kecamatan langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan perubahan atau gejala yang perubahan peran atau perbedaan peran antara satu *tu'a golo* dengan *tu'a golo* yang lain.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yaitu penelitian studi etnografis. Metode Penelitian etnografis merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif, seperti tuturan orang, atau perilaku-perilaku yang lainnya yang tampak misalnya (a) apa yang dikatakan orang, (b) apa yang dilakukan orang, dan (c), artifak yang digunakan orang. Metode etnografis memungkinkan kita memahami orang lain secara pribadi.

Melalui penelitian ini kita dapat belajar perihal kelompok manusia dan pengalaman-pengalamannya yang mungkin sebelumnya tidak diketahui sama sekali. Sumber dalam penelitian etnografis dapat berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain (Mantja,2007:47).Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap peran *tu'a golo* di *gendang-gendang* yang ada di wilayah kecamatan langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu *Gendang Ruteng*, *Gendang Carep*, *Gendang Ka Sama*, *Gendang Lempe*, *Gendang Pau*, *Gendang Waso*, *Gendang Kumba*, *Gendang Tenda*, *Gendang Lawir* dan *Gendang Karot*.

3.2. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang disiapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

3.2.1. Tahap perencanaan

Pada tahapan perencanaan, peneliti terlebih dahulu menentukan lokus penelitian, kemudian melakukan survei ke lokus yang dijadikan sebagai obyek penelitian peneliti. Survei ke lokus penelitian ini di buat agar peneliti dapat meninjau lebih dekat apakah lokus yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian tersebut benar-benar layak sebagai tempat penelitian. Selain itu, peneliti juga telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mewawancarai para informan serta peneliti juga mempersiapkan segala instrumen perlengkapan penelitian untuk mengumpulkan data. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi penelitian dari sekretariat LPPM STIPAS kepada Kepala Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kabupaten Manggarai, Camat Langke Rembong untuk seterusnya disampaikan kepada *tu'a golo* di *Gendang Ruteng*, *Gendang Carep*, *Gendang Ka Sama*, *Gendang Lempe*, *Gendang Pau*, *Gendang Waso*, *Gendang Kumba*, *Gendang Tenda*, *Gendang Lawir* dan *Gendang Karot*.

3.2.2. Tahap pelaksanaan

Dalam melaksanakan penelitian yang dijalankan oleh peneliti di Lokus penelitian, peneliti melakukan teknik wawancara kepada para informan yang adalah para *tu'a golo* yang ada di sepuluh gendang, dan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi saksi sejarah di wilayah

Kecamatan Langke Rembong tersebut. Proses wawancara tersebut dapat disertai dengan dokumentasi melalui foto dan rekaman suara wawancara menggunakan *handphone* (Hp).

3.2.3. Laporan penelitian

Pada tahapan akhir dari penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti, terlebih dahulu peneliti melakukan pengkajian kembali hasil penelitian yang telah ditemukan di lokus penelitian melalui analisis data. Analisis data tersebut dibuat untuk mengecek kembali data-data penelitian yang telah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang kelak digunakan sebagai pertanggungjawaban atas usulan proposal penelitian yang ada.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Wilayah kecamatan ini merupakan pusat ibu kota kabupaten Manggarai. Sebagai pusat ibu kota Kabupaten, wilayah administratif pemerintahan ini membawahi sepuluh wilayah administratif budaya yang disebut sebagai *gendang*. *Gendang* merupakan pusat wilayah kekuasaan setiap kampung. Dalam budaya Manggarai, *gendang* mengandaikan adanya tanah (*lingko*) yang seringkali dinyatakan dalam bentuk ungkapan *gendangn one, lingkon peang* (rumah *gendang* merujuk pada sejumlah wilayah tanah ulayat). Kesepuluh *gendang* yang ada di wilayah Kecamatan Lenge Rembong adalah yaitu *Gendang Ruteng, Gendang Carep, Gendang Ka Sama, Gendang Lempe, Gendang Pau, Gendang Waso, Gendang Kumba, Gendang Tenda, Gendang Lawir* dan *Gendang Karot*.

Peneliti tertarik mengambil tempat penelitian ini, karena beberapa alasan: *pertama*, *gendang* yang ada di wilayah ini adat sekaligus berada di ibukota sebagai ikon perubahan sosial; *kedua*, *gendang* yang berada di wilayah ini hampir kurang memiliki batasan yang jelas karena banyaknya pendatang yang menghuni wilayah ini; *ketiga*, peran *tu'a golo* di wilayah *gendang* ini mengalami pergeseran fungsi dan kekuasaan sebagai efek perubahan sosial.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen.

3.4.1. Wawancara

Menurut Burhan, (2001:133) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara pewawancara dan diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain. Informaan yang akan diwawancarai adalah sepuluh *tu'a golo* yang ada di sepuluh gendang yang ada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

3.4.2. Observasi

Menurut Guba dan Lincon (dalam Moleong 1998:174) teknik observasi atau pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung oleh peneliti, kemudian mencatat semua perilaku dan kejadian sebagaimana yang telah terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Observasi atau pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat situasi masyarakat yang berada di gendang yang berada di wilayah kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian. Selama melakukan observasi, peneliti berusaha untuk menciptakan relasi yang baik dengan masyarakat kesepuluh gendang yang dapat diwakili oleh ketiga gendang tertua di wilayah ini yaitu *gendang* Ruteng, *gendang* Ka dan *Gendang* Carep.

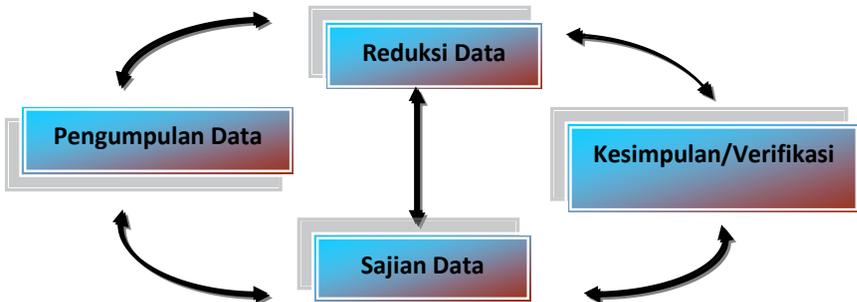
3.4.3. Studi Dokumen

Dokumentasi dapat dilakukan peneliti melalui penelaahan bahan-bahan bacaan yang tersedia baik berupa buku artikel maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi juga diperoleh melalui rekaman audio, visual dan audiovisual yang dilakukan peneliti saat penelitian lapangan. Dokumen yang telah diperoleh kemudian diproses dan dianalisis serta dibandingkan untuk menjadi suatu hasil kajian yang sistematis.

3.4.4. Analisis Data

Miles dan Huberman (1992:45), mengemukakan tiga tahap dalam kegiatan menganalisis data kualitatif yaitu "reduksi data, penyajian

data, dan menarik kesimpulan/verifikasi". Berikut adalah model interaktif analisis data.



Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

Kegiatan analisis data yang terdiri atas tiga komponen utama ini; (1) Reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data dapat berupa pembuatan singkatan, pengkodean, pengkategorian, pengurutan, pengelompokan, pemusatan tema, penentuan batas-batas permasalahan, dan pembuatan memo. Pusat perhatian reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan; mempertegas, memperpendek, menajamkan, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Penyajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan. yang utama dalam sajian data adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data sehingga membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisisnya.

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan sajian data. Penarikan kesimpulan sementara dapat dilakukan berdasarkan matriks-matriks yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik atau tema-tema sesuai dengan fokus penelitian. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah perpanjangan keikutsertaan,

ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, telaah kasus negatif, dan pengecekan anggota.

Dalam tahap penelitian ini, pengambilan simpulan dilakukan secara bertahap. *Pertama*, menyusun kesimpulan sementara (*tentatif*), tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada dan melakukan "*peer debriefing*" dengan teman sejawat, agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif. *Kedua*, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan informan dengan yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual (Arifin, 2011:174).

IV. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini diuraikan berdasarkan beberapa pokok yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana bentuk peran *tu'a golo* di *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; *kedua*, bagaimana proses pemberian peran *tu'a golo* dalam kehidupan masyarakat *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; *ketiga*, apa saja faktor pendorong perubahan peran *tu'a golo* di *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.1. Bentuk Peran *Tu'a Golo* di *Gendang* yang Berada di Wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tu'a golo adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah kampung (*beo*) sehingga dia berperan penting dalam mengatur kehidupan warga kampung. Peran ini begitu kuat dan mengikat kehidupan warga kampung sehingga segala kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan bersama harus sepengetahuan *tu'a golo*. Gambaran ini merupakan keberadaan masa lampau *tu'a golo* sebagai satu-satunya sistem organisasi masyarakat alamiah yang tumbuh dalam proses historisitas keberadaan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan peran *tu'a golo* dalam konteks kehidupan masyarakat Manggarai di era post-modern sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencari informasi pada 10 informan yang adalah *tu'a golo* di sepuluh

gendang yang ada di wilayah kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan 100 responden dari kesepuluh gendang, yaitu *Gendang Ruteng*, *Gendang Carep*, *Gendang Ka Sama*, *Gendang Lempe*, *Gendang Pau*, *Gendang Waso*, *Gendang Kumba*, *Gendang Tenda*, *Gendang Lawir* dan *Gendang Karot*. Hasil pembahasannya diuraikan berikut ini.

4.1.1. Memimpin Aktivitas Sosial *Mbaru Gendang*

Secara fisik, pemukiman masyarakat *Gendang* di wilayah Kecamatan Langke Rembong tidak lagi terpusat pada *mbaru gendang* sekalipun pada bagian tertentu masih tampak tata letak yang terpusat pada gendang. Dari sebaran tata letak perumahan yang ada, sebagian besar penempatan rumah (*mbaru bate kaeng*) mengikuti pola tata kota modern. Hal ini agak berbeda dengan sistem masyarakat tradisional yang berpusat pada *mbaru gendang*. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa aktivitas sosial yang berpusatkan *gendang* mengalami pergeseran sejalan dengan munculnya berbagai pusat aktivitas lembaga lain seperti lembaga pemerintahan, ekonomi-pasar, pendidikan, agama, dan pusat lembaga-lembaga lainnya. Contohnya, kehadiran lembaga agama seperti agama Katolik, Protestan, Islam dan Hindu di tanah Manggarai dapat mengubah pusat aktivitas spiritual yang sebelumnya adalah monopoli *gendang* (*gendangn one linkon peang*) kini terbagi dalam konsep ritual gereja, masjid dan pura. Demikian pula halnya kehadiran lembaga-lembaga lain. Semua lembaga tersebut dapat mendivergensi sentralitas aktivitas pada *mbaru gendang*.

Peran *tu'a golo* sebagai penggerak aktivitas sosial *mbaru gendang* dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Foto *Lonto Leok* (Musyawarah) yang dipimpin oleh *Tu'a Golo*

Seiring perguliran waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *tu'a golo* sebagai pemimpin tertinggi (*top leader*) sebuah kampung (*beo/gendang*) mulai memudar. Hal ini tampak dari kuantitas dan intensitas penggunaan *mbaru gendang* oleh *tu'a golo* untuk melayani kebutuhan budaya masyarakat. Maksimal penggunaan *mbaru gendang* untuk hajatan budaya adalah 2 kali dalam setahun, yaitu *acara penti* (upacara syukur) dan *teing hang caling taung* (persembahan untuk para leluhur). Ada gendang yang kedua aktivitas tadi tidak dilakukan secara regular setiap tahun sehingga dalam setahun bisa tidak ada aktivitas di *mbaru gendang*. Bahkan Gendang Lawir, sejak 5 tahun lalu sampai sekarang ini tidak ada *mbaru gendang*. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi *mbaru gendang* yang menjadi pusat kegiatan ritual budaya dan representasi peran *tu'a golo* sudah mulai berkurang.

Seyogianya *mbaru gendang* diramaikan dengan fungsi spiritual seperti acara *wuat wai* (memberi sesajian kepada roh nenek moyang sebelum bepergian jauh), *roko* (upacara penerimaan secara adat seorang wanita yang secara sah masuk dalam klan tertentu), *lonto leok* (musyawarah untuk mufakat), dan berbagai jenis tarian adat seperti *landu/rindo*, *sanda*, *mbata danding*, *sae*, *caci*, *krangkuk alu*, *caka tinding*, yang dipentaskan di halaman kampung (*natas labar*). Sekarang ini kegiatan ini hampir punah dan ada yang tinggal namanya saja. Konsekuensinya, generasi muda ketika ditanyakan perihal jenis upacara ritual, seni ataupun bentuk aktivitas budaya lainnya, banyak yang tidak pernah menyaksikannya. Singkatnya, aktivitas *mbaru bate kaeng*, *natas bate labar*, *uma bate duat*, dan *wae bate teku* jarang diperankan masyarakat dalam koordinasi *tu'a golo*.

Aktivitas budaya cenderung digantikan dengan aktivitas alternatif yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga modern. Contohnya tarian *sanda*, *mbata danding*, dan *sae* diganti dengan poco-poco, wals, caca, dansa, rokatenda, jai, dan lain-lain; *landu/dere/rindo* budayadiganti dengan karaoke, *show band*, *marching band*, dan lain-lain; tarian *caci* disubstitusi dengan pertunjukan drama, teater, film yang bahkan telah dikemas dalam ponsel pribadi (*handphone*) dengan teknik teknologi modern. Dengan itu pula, tokoh sentral dan penggerak pluralitas aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh *tu'a golo* dan bahkan *tu'a golo* menjadi obyek dari aktivitas-aktivitas modern tersebut.

Sekalipun cenderung menurun, peran *tu'a golo* masih tampak dalam beberapa ritual budaya, seperti *penti weki peso beo*, *hang woja*, *hang rani*, yaitu ritual budaya untuk mengungkapkan syukur atas semua hasil yang diterima selama satu tahun atau musim tanam. Sebagai contoh, di gendang Ka Sama acara ritual *penti* dilaksanakan setiap tahun berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh *tu'agendang/goloyang* melibatkan ketujuh panga: *panga lao kae*, *panga lao (ase)*, *panga leda*, *panga Mesir-poco leok*, *panga Ruteng*, *panga Kasong*, *panga Ase Kae* (*semua pendatang yang sudah menjadi warga setempat*). Apabila hal ini dilaksanakan, maka semua penduduk yang menempati wilayah (tanah ulayat) tersebut baik warga keturunan (*ata ici tana*) maupun pendatang atas dasar ikatan perkawinan (*dongge mata one*) atau mencari nafkah (*long*), wajib terlibat dalam acara ritual tersebut. Sekalipun demikian, pelaksanaan acara ritual tersebut tidak bersifat mengikat yang berarti wajib hadir dalam seluruh proses tersebut karena fakta menunjukkan pluralitas penduduk berdasarkan asal, ras, golongan, agama, pekerjaan, sehingga banyak orang lebih memberikan kontribusi berupa uang sebagai ungkapan partisipasi mereka.

Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa masyarakat gendang di wilayah Langke Rembong masih menjalankan acara-acara ritual budaya seperti *penti* secara regular setiap tahun. Konsep keberhasilan satu musim tanam bukan lagi dasar dari pelaksanaan acara ritual *penti* karena sebagian besar anggota masyarakat gendang di wilayah kecamatan Langke Rembong tidak lagi bermata pencaharian sebagai petani melainkan sebagai pegawai di kantor-kantor baik swasta maupun negeri dan berwirausaha.

4.1.2. Menjaga Kepemilikan Tanah

Salah satu unsur tata pemerintahan tradisional budaya Manggarai adalah *lingko* (wilayah atau tanah ulayat). Aktivitas sosial budaya yang berpusatkan *mbaru gendang* akan memperoleh penguatan sosial melalui keberadaan tanah ulayat/wilayah (*lingko*). Hal ini terungkap dalam istilah *gendangn one*, *lingkon peang* (rumah adat sebagai pusat dan kawasan tanah wilayah kekuasaan). Orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengurus kehidupan masyarakat terhadap segala dimensi sosialnya adalah *tu'a golo*. Dalam hal pembagian tanah, *tu'a golo* menunjuk *tu'a*

teno untuk mengatur dan mengawasi cara pembagian kepemilikan tanah ulayat kepada warganya (*paang olo ngaung musu* atau *ase kae golo*). Penunjukkan tersebut dilakukan *tu'a golo* atas dasar mufakat (*lonto leok*) dengan *tu'a-tu'a panga* dan masyarakat lainnya. *Tu'a teno* biasanya diambil dari *tu'a panga* (klan) sehingga sering ditemukan bahwa *tu'a teno* rangkap juga sebagai *tu'a panga*.

Jabatan *tu'a golo/tu'a gendang/tu'a beo* dipegang oleh satu orang saja sedangkan jabatan sebagai *tu'a panga* dan *tu'a teno* bisa dipegang oleh lebih dari satu orang berdasarkan banyaknya klan yang menempati kampung (*beo*) dan banyaknya wilayah (*lingko*) yang akan dibagi kepada warga masyarakat (Janggur, 2008:226-227). Contohnya, *Gendang Ka sama* memiliki tujuh *tu'a panga* karena terdapat terdapat tujuh klan, yaitu *tu'a panga Lao (kae)*, *tu'a panga Lao (ase)*, *tu'a panga Leda*, *tu'a panga Mesir-Poco Leok*, *tu'a panga Ruteng*, *tu'a panga Kasong-Ndoso*, *tu'a panga Ase Kae (semua pendatang yang sudah menjadi warga setempat)*. Demikian pula kalau dalam satu kampung terdapat lima *lingko*, maka akan ada lima *tu'a teno* sekalipun ada tujuh klan/suku.

Dalam pembagian tanah, *tu'a teno* biasanya memakai sistem *lodok* (melingkar) sehingga hasil akhirnya membantuk pembagian seperti jaring laba-laba (*spider field*). Disebut sebagai *tu'a teno* karena saat membagi tanah, orang yang ditunjuk oleh *tu'a golo* akan menempatkan pohon *teno* sebagai titik tengah dan titik starnya. Kayu ini diambil karena karakter fisiknya lurus sebagai simbol keadilan (Nggoro, 2006:180). Untuk menetapkan batas-batas kepemilikan tanah *lodok lingko*, *tu'a teno* akan menanamkan kayu *nao*. Pohon ini dianggap sebagai pohon yang bertahan hidup dalam semua kondisi atau musim (hujan dan kering). Apabila semua proses tersebut dilakukan, maka pada akhirnya *tu'a teno* wajib melaporkan hasil pembagiannya kepada *tu'a golo* sebagai pemimpin utama dalam kampung. Dengan demikian, *tu'a golo* adalah penanggung jawab umum dan utama atas kepemilikan tanah dan menetapkan bahwa pembagian (*lodok lingko*) dinyatakan adil dan sah (Nggoro, 2006:39, 78). Dengan itu pula *tu'a golo* adalah penanggung jawab umum dan saksi kunci legalitas kepemilikan tanah apabila terjadi persengketaan batas kepemilikan tanah.

Berikut ini ditampilkan foto hasil pembagian tanah oleh *tu'a golo* yang diwakilkan kepada *tu'a teno* sebagai pihak yang membagi kepemilikan tanah *lingko* (ulayat).



Gambar 3. Model Pembagian Tanah (*lodok lingko*) Dalam Budaya Manggarai

Berdasarkan hasil penelitian, delegasi *tu'a golo* kepada *tu'a teno* untuk membagi tanah sudah tidak terjadi lagi di dalam konteks kehidupan masyarakat Gendang di wilayah Langke Rembong. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan lahan kosong yang menjadi tanah ulayat (*lingko*) untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Dengan kata lain, semua tanah ulayat sudah habis dibagi sehingga tidak ada tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat (tanah umum). Oleh karena itu, peran utama *tu'a golo* dan *tu'a teno* adalah saksi kunci kepemilikan lahan.

Para informan menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa batas dan kepemilikan tanah dalam konteks sekarang banyak diselesaikan di lembaga hukum positif dan saksi kuncinya adalah *tu'a golo*. Dalam beberapa kasus yang diselesaikan oleh lembaga hukum di pengadilan negeri Ruteng, kesaksian *tu'a golo* merupakan bahan pertimbangan utama para hakim untuk mengambil keputusan. Semua bukti dokumen seperti surat jual beli, berita acara pembelian tanah dan sertifikat tanah dapat dilakukan secara sah dan legal apabila sepengetahuan dan melibatkan kesaksian *tu'a golo* dan *tu'a teno*.

Kendala yang muncul dalam konteks sekarang ini adalah keberadaan *tu'a golo* yang bukan pelaku sejarah melainkan sebagai pewaris

tahta kepemimpinan *tu'a golo*. Sesuai sistem administrasi masyarakat tradisional Manggarai, kekuatan kesaksian *tu'a golo* dan *tu'a teno* masih menggunakan tradisi lisan yang mengandalkan cerita lisan secara turun-temurun. Walaupun demikian, ada beberapa *gendang* seperti *Gendang Tuke* telah mulai menggunakan sistem pembukuan untuk menulis semua kepemilikan lahan sekalipun tidak selengkap sistem administrasi modern.

Singkatnya, peran *tu'a golo* dalam sistem sosial masyarakat gendang di Wilayah Kecamatan Langke Rembong dalam hal *lingko* (lahan) mengalami pergeseran fungsi dari fungsi utama pembagian lahan kepada fungsi sebagai saksi kunci kepemilikan lahan. Hal ini akan tetap terpelihara manakala sistem pengadilan lembaga pemerintahan menempatkan *tu'a golo* sebagai kunci kepemilikan dalam pengambilan keputusan atau dalam menerbitkan sertifikat tanah. Sekalipun demikian, lambat laun semua kesaksian ini akan tidak kuat lagi ketika semua legalitas itu diadministrasikan secara modern melalui sistem administrasi pemerintahan demi menjaga originalitas kesaksian. Hal ini akan bermanfaat untuk menghilangkan subyektivitas *tu'a golo* dalam memberi kesaksian karena perbedaan generasi ataupun hal lainnya.

4.1.3. Menetapkan Upacara Ritual Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung

Koyagama (dalam Janggur, 2008:61) menulis dalam bukunya yang berjudul "Injil dalam Pandangan Asia" menyebutkan: "bangsa Indonesia adalah bangsa rohani". Digambarkan bahwa mereka pergi dengan roh-rohnya. Kehadiran serta kegiatan roh-roh merupakan kenyataan. Hal ini didukung oleh temuan Clifford Geertz yang menuliskan bahwa penduduk Indonesia (yang diwakili oleh Jawa karena penelitiannya di Pulau Jawa) hidup bersama roh yang baik dan roh yang jahat. Masyarakat dan roh-roh berdampingan dalam kehidupan masyarakat yang utuh. Dunia pemikiran tradisional spritual masyarakat Timur khususnya bangsa Indonesia adalah dunia dari banyak roh (Janggur, 2008: 61).

Demikian pun, orang Manggarai mengakui tiga fundamen dasar kehidupan manusia yaitu Pencipta (*morin agu Ngaran*), alam semesta (*tanan wa awangn eta*), dan roh leluhur (*ceki agu bura*). Ketiga elemen ini selalu hadir dan menjamin eksistensi masyarakat Manggarai sehingga

apapun tema atau jenis upacara ritualnya, ketiga elemen ini harus selalu hadir untuk menjalankan acara ritual yang sah dan legalistik. Dengan demikian, acara ritual budaya Manggarai mengandung tiga dimensi relasional tersebut, yaitu Tuhan, alam dan jiwa/roh nenek moyang.

Wujud nyata kepercayaan tersebut diungkapkan dalam pelaksanaan ritus-ritus adat. Untuk melaksanakan upacara ritual adat, *tu'a golo* hadir sebagai pemeran utama dalam menata dan mengeksekusi pelaksanaan ritus yang menghubungkan manusia dengan dunia roh. Dunia roh disebut sebagai *ceki agu bura* sedangkan dunia orang hidup disebut sebagai *raja*. Salah satu persyaratan untuk melaksanakan acara ritual adalah persatuan dan perdamaian semua *raja* (keluarga yang masih hidup). Apabila tali persaudaraan *raja* kuat maka sesajian yang dibuat dalam upacara *teing hang* akan direstui para leluhur (*ceki agu bura*). Hal ini terungkap dalam istilah *eme neki de raja, lorong nggitu de ceki agu bura*. Apabila masih ada hal yang menggajal relasi sosial sebaiknya acara ritual tidak dibuat atau didahulukan acara *hambor*. Pada titik inilah *tu'a golo* hadir sebagai sebagai *ata caca mbolot* (orang yang memberi solusi).

Bergeser dari konsep ritual di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat gendang yang menempati wilayah Langke Rembong sekarang ini tidak merasa wajib untuk melaksanakan upacara ritual budaya seperti *roko, teing hang*, dan lain-lain. Salah satu faktornya adalah pluralitas suku, agama, golongan, ras, dan lain-lain sehingga acara-acara ritual tersebut dipersepsi secara berbeda sesuai dengan cara berpikir atau doktrin setiap golongan, agama dan ras tersebut. Sekalipun demikian, salah satu upacara ritual yang masih dilaksanakan dalam konteks masyarakat Manggarai sampai sekarang ini adalah upacara *penti*. Ritus ini terdiri beberapa acara inti, yaitu: *barong wae teku* (ritus pada mata air tempat timbaan masyarakat), *barong boa* (ritus pada penguburan umum), *libur kilo* (mempertemukan seluruh keluarga atau suku) dan *takung mangko mese* (acara ritual umum yang menyatukan semua ritus suku atau keluarga dalam satu kampung).

Pelaksana dan pemimpin utama upacara ini seluruh rangkaian acara tersebut adalah *tu'a golo* yang juga melibatkan anggota masyarakat (*pang olo ngaung musu*). yaitu upacara ritual-kultural untuk mengungkapkan syukuran atas hasil kerja manusia selama satu musim tanam. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang menegaskan

bahwa *upacara penti* wajib dilaksanakan secara reguler dalam hajatan budaya masyarakat di seluruh gendang di wilayah Lengke Rembong. Penggerak utama hajatan ini adalah *tu'a golo*. Semua gendang menyepakati bahwa seluruh warga masyarakat berlatar belakang apa pun wajib terlibat aktif dalam upacara tersebut. Keterlibatan yang paling mendasar adalah sumbangan uang yang pada dasarnya disumbangkan berdasarkan besarnya kepemilikan lahan atau tanah di dilayah gendang bersangkutan.

4.2. Proses Pemberian Peran *Tu'a Golo* Dalam Kehidupan Masyarakat *Gendang* yang berada di wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam sistem sosial masyarakat tradisional Manggarai, jabatan *tu'a golo* adalah jabatan yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan hubungan genealogis. Itu berarti jabatan sebagai *tu'a golo* bersifat "ditetapkan" bukan "dipilih" secara musyawarah atau demokratis melainkan jabatan yang sifatnya turun-temurun menurut garis keturunan laki-laki (Janggur, 2008:227). Konsekuensinya, kualitas diri seorang *tu'a golo* dikondisikan secara genealogis dari generasi ke generasi. Dengan itu pula terdapat anggapan masyarakat bahwa kewibawaan itu akan diturunkan dari generasi ke generasi. Anggapan ini munumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa semua keturunan *tu'a golo* pasti mampu melaksanakan kepemimpinan *tu'a golo* asal saja berjenis kelamin laki-laki sulung. Kepercayaan ini diperkuat oleh kepercayaan bahwa roh para leluhur awaliah akan selalu menginspirasi *tu'a golo* dalam menjalankan peran kepemimpinan terutama dalam menjalankan acara ritual budaya.

Dalam perjalanan waktu, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses suksesi kepemimpinan sebagai *tu'a golo*, antara lain: semua keturunan berjenis kelamin perempuan, anak laki-laki sulung tidak secap anak-anak laki-laki lain, adanya tuntutan kompetensi personal, sosial, intelektual, keterampilan dan lain-lain yang ditetakan dalam konsep kepemimpinan modern. Fakta sosial ini mendorong adanya perubahan dalam proses penetapan *tu'a golo*. Hal ini ditemukan oleh peneliti bahwa dari kesepuluh gendang yang terdapat di kecamatan Langke Rembong, ada satu gendang yang masih menetapkan *tu'a golo*-nya berdasarkan konsep anak sulung laki-laki, yaitu Gendang Ka Sama. Selain itu, semua gendang menetapkan *tu'a*

golo-nya berdasarkan kompetensi tertentu seperti memiliki kecakapan *tudak* (minimal kecakapan bahasa ritual) walaupun bukan anak sulung asalkan dari garis keturunan *tu'a golo*.

Alasan mendasar konsep *tu'a golo* yang terpaku pada anak sulung laki-laki adalah *rang* (kewibawaan secara turun-temurun). Menurut konsep pemilihan kepemimpinan ini, *tu'a golo* tidak harus memiliki kecakapan tertentu. Mereka yakin bahwa sekalipun tidak memiliki keterampilan budaya tertentu, dia tetap memiliki karisma yang diturunkan dari pendahulunya dalam seluruh dirinya untuk menjadi seorang yang bijak (*wae nggereng*). Selain itu, konsekuensi dari kepemimpinan seperti ini, musyawarah (*lonto leok*) adalah satu jalan yang rutin dijalankan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, perangkat lainnya dalam bentuk *tu'a panga* (pemimpin dari setiap suku atau kelompok) lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya dari sudut pandang kepemimpinan modern adalah kurang efektif dan efisien karena keputusan yang diambil harus dimusyawarahkan.

Di sisi lain, kesembilan gendang lain seperti *gendang ruteng*, Ka Sama, Waso, Kumba, Tenda, Lawir, Lempe, Pau, Carep menetapkan *tu'a golo*-nya berdasarkan pertama adalah kemampuan memimpin acara ritual (*tudak*) dan *ata bae tombo* (orang yang mampu berbicara). Berbicara bagi mereka adalah ungkapan sistem berpikir yang baik dan benar. Penekanan utama kepemimpinan *tu'a golo* bagimereka adalah kecakapan. Kecakapan sangat penting agar dapat mengambil keputusan yang bijak. Kelemahan sistem ini adalah keputusan yang dihasilkan dilihat sebagai kemampuan pribadi *tu'a golo* sehingga *tu'a golo* dapat bersifat subyektif dan bekerja sendiri dan mengabaikan mufakat (*lonto leok*) dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Konsekuensinya, ketua kelompok/suku (*tu'a panga*) dapat dilibatkan apabila berhubungan dengan hajatan yang besar atau masalah yang cukup urgen untuk mereka libatkan. Walaupun hal ini dianggap sebagai efektif dan efisien dalam kaca mata masyarakat modern karena tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengambil suatu keputusan.

4.3. Faktor-faktor Pendorong Perubahan *Tu'a Golo* di Gendang yang Berada Di Wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uraian terdahulu secara implisit telah menggambarkan faktor pendorong perubahan peran *tu'a golo*. Pada bagian ini kita perlu mengetahui beberapa

faktor pendorong keberlangsungan peran *tu'a golo* di gendang-gendang yang ada di kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berikut ini.

4.3.1. Melemahnya Proses Sosialisasi Nilai Budaya

Salah satu budaya yang dihidupi masyarakat sekarang ini adalah budaya media. Batmomolin dan Hermawan (2003:39) mendefinisikan budaya media sebagai perpaduan yang mengagumkan antara gambar (*image*) dan suara (*sound*) yang dikemas sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan hal-hal yang seba pekstakuler dari keseharian. Budaya media adalah budaya audiovisual yang berteknologi tinggi sehingga memudahkan pemberian dan penerimaan pesan secara atraktif. Budaya ini dapat menggantikan budaya lisan yang seringkali terbatas pada ruang dan waktu serta seringkali kurang atraktif dibandingkan budaya media yang melibatkan rekayasa teknologi. Budaya media sebenarnya dapat membantu proses sosialisasi nilai dari generasi ke generasi. Persoalan yang muncul manakala dalam budaya tradisional Manggarai lebih nyaman menggunakan tradisi lisan dalam mentransfer nilai antar generasi. Atas dasar itu, generasi milenial (generasi yang berumur 17-37 tahun sebagai pengguna aktif teknologi) kurang tertarik dengan cara pentransferan nilai budaya dengan cara konvensional-tradisional seperti tradisi lisan.

Selain cara sosialisasi di atas, kelemahan dalam proses sosialisasi budaya adalah kurangnya pelibatan generasi baru sebagai kaderisasi fungsionaris kultural masa depan yang mumpuni. Budaya yang membiarkan menjauhkan anak-anak dari jangkauan hajatan budaya karena dianggap sakral atau suci dapat memperlemah proses sosialisasi. Orangtua seringkali menganggap anak-anak sebagai pengganggu sakralitas upacara ritual budaya. Hal ini ditunjukkan dengan ungkapan orang dewasa seperti ini sebagai bentuk kebiasaan buruk dalam proses sosialisasi nilai budaya: *ega meu anak koen, toe ma bae apa-apa* (menjauhlah anak-anak, karena kamu belum tahu apa-apa). Semestinya anak-anak mendekat sebagai bentuk keinginan untuk belajar atau sosialisasi.

4.3.2. Pluralisme Kelompok Sosial

Salah satu tren atau kecenderungan yang menonjol dalam era globalisasi adalah adanya perpindahan penduduk dari satu tempat ke

tempat lain sehingga terjadi pluralitas dimensi hidup masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh mudahnya akses komunikasi dan transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Mobilitas masyarakat untuk melakukan translokasi tersebut bisa disebabkan oleh multiformitas tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Upaya formal untuk mencapai cita-cita tersebut membentuk suatu tatanan sosial baru dalam bentuk kelompok sosial formal. Dalam konteks seperti ini, salah satu keniscayaan era globalisasi adalah pluralisme atau pluriformitas budaya, suku, agama, ras, golongan, warga Negara, dan lain-lain.

Pluriformitas warga masyarakat mendorong terjadinya diversitas pola hubungan dalam masyarakat, yaitu pola hubungan yang tidak hanya tertuju pada satu arah atau arah tertentu tergantung pada tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai. Diversitas pola hubungan tersebut turut membentuk pluralisme kelompok sosial dalam masyarakat. Diversitas pola interaksi ini memberikan alternative hubungan masyarakat satu sama lain sehingga tidak hanya tunduk pada satu pola hubungan atau interaksi. Dalam situasi dan kondisi sosial seperti, pola hubungan dengan *tu'a golo* pun merupakan salah satu alternatif dari sekian banyak pola hubungan yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial. Fakta ini sejalan dengan pendapat Gillin dan Gillin (dalam Soekanto dan Sulistiowati, 2002) mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan tersebut menurut Maclver didasari oleh adanya *utilitarian elements* dan *culture elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder.

Dengan demikian, masyarakat yang menempati wilayah gendang di Kecamatan Langke Rembong telah menganut berbagai peran sesuai dengan banyaknya lembaga sosial yang dia libat. Ada berbagai lembaga sosial yang dominan yaitu, lembaga agama, lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kehadiran lembaga-lembaga ini dapat memberikan cara berpikir yang lain dari cara berpikir sosial budaya Manggarai. Selain itu, aktivitas sosial pun turut mengalami divergensi atau perluasan di mana tidak hanya berpusat pada aktivitas

gendang melainkan juga terseat pada berbagai aktivitas lainya seperti aktivitas modal di pasar, aktivitas pembelajaran di lembaga pendidikan, aktivitas spiritual di lembaga keagamaan baik Katolik, Kristen Protestan, Islam maupun Hindu, dan berbagai aktivitas lainnya. Fakta perubahan sosial disebut sebagai difusi (Ganggu dan Satu, 2011:9.2-9.3).

Contoh proses difusi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Manggarai adalah pengaruh doktrin agama modern pada sistem berpikir spiritual tradisi Manggarai. Dalam artian tertentu, ada nilai budaya yang diperbaharui oleh agama-agama karena dipandang sebagai bentuk pentahyulan atau bentuk kegiatan kekaifiran. Ada pula nilai spiritual budaya yang sejalan dengan nilai yang ditawarkan agama-agama modern namun diberi arti baru (difusi). Oleh karena itu, dalam banyak upacara ritual selalu diakhiri dengan upacara keagamaan terutama bagi masyarakat yang menganut agama Katolik. Semua upacara ritual budaya yang masih hidup seperti *acara penti* (syukur atas hasil panen), *congko lokap* (pentahbisan rumah adat), *teing hang* (pemberian sesajian kepada arwah nenek moyang), *hese ngando* (upacara pembangunan rumah untuk menyatukan roh penguasa tanah (*naga tanah*) dengan pemilik rumah, ritus purifikasi seperti *podo dara taa* (pemutusan hukum karma) dan acara-acara kematian seperti *pedeng bokong* (memberi bekal bagi orang yang telah meninggal dunia), *kelas* (ritus pemisahan dunia orang meninggal dan dunia orang yang masih hidup, dan lain-lain belum lengkap kalau tidak diakhiri dengan upacara ritual keagamaan (misa atau perayaan ekaristi).

Dampak lanjutan dari proses difusi tersebut adalah ritus-ritus budaya tradisional diberi makna baru (dekonstruksi) sehingga acara ritual masih tetap hidup namun tidak seketat dahulu. Tentu hal ini berdampak pada perubahan peran *tu'a golo*. Sekalipun *tu'a golo* tidak dapat memimpin semua acara tersebut, namun untuk membuat ritus-ritus tersebut tidak terganggu (*toe manga babang agu bentang*) oleh dunia roh (*ceki agu bura*), maka harus hadir dalam ritus tersebut yang mewakili masyarakat (*paang olo ngaung musu*). Perwakilan ini selalu tertuju kepada *tu'a golo* yang disebut sebagai penjaga pintu depan dan pintu belakang (*paang olo ngaung musu*). Kehadirannya atau yang mewakili (biasanya perwakilannya tetap dari keturunan *tu'a golo*) dapat meratifikasi upacara

tersebut menjadi upacara yang mengikat dan sah baik secara manusiawi maupun oleh roh leluhur (*ceki*) yang adalah titik sasar acara tersebut.

4.3.3. Perkembangan Paradigma Berpikir

Pertemuan dengan berbagai budaya dan terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah cara berpikir dan pola hidup masyarakat. Sebagai contoh, perkembangan ilmu modern dapat mengedepankan fungsi intelek sebagai untuk mengelola alam semesta. Oleh karena itu rasionalitas sangat ditekankan menganalisis setiap situasi hidup di tengah masyarakat. Semua yang irasionalitas jarang diterima sehingga lambat laun dihilangkan dan tidak dihiraukan.

Sebagai contoh, kurangnya penghargaan masyarakat terhadap ritus-ritus adat disebabkan oleh perubahan cara berpikir yang sangat mengedepankan rasionalitas. Kepercayaan bahwa ada sanksi spiritual apabila tidak menjalankan ritus-ritus cultural seperti *teing hang*, *wee mbaru*, dan lain-lain kurang kuat pengaruhnya untuk mendorong masyarakat melaksanakan acara ritual tersebut. Sebagian besar masyarakat telah dipengaruhi cara berpikir agama modern sebagaimana disebutkan tadi sehingga cara berpikir di atas pun diganti dengan konsep kemahakuasaan dan belaskasihan Allah. Hal ini diketahui dari jawaban masyarakat yang merasa tidak wajib melaksanakan itu karena tidak ada efek sosial dan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam konsep budaya Manggarai.

Selain itu, revolusi politik Perancis juga telah mengubah menggantikan sistem dan struktur adat yang pada dasarnya feodal seperti yang masih berlaku dalam penetapan *tu'a golo* dengan sistem politik demokrasi, yaitu sistem politik yang menentukan pemimpin berdasarkan pemilihan bukan penetapan. Hal ini kemudian bertolak belakang dengan sistem struktur adat yang masih menggunakan sistem feodal dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Soekanto dan Sulistiowati (2002:301) juga menemukan beberapa faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara lain: *pertama*, kontak dengan kebudayaan lain, *kedua*, sistem pendidikan yang maju, *ketiga*, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, *keempat*, toleransi terhadap perbuatan menyimpang, *kelima*, sistem masyarakat yang terbuka, *keenam*, penduduk yang heterogen,

ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, *kedelapan*, orientasi ke depan, *kesembilan*, nilai meningkatnya taraf hidup.

Atas dasar itu, dalam masyarakat terbentuk dua sistem kekuasaan yaitu sistem kekuasaan pemerintahan yang dimulai dari Presiden sampai Ketua RT sistem adat masyarakat setempat yang dimulai dari *tu'a panga* dan sampai pada *tu'a golo*. Himpunan *tu'a golo* membentuk satu-kesatuan wilayah yang disebut *kedaluan*. Sampai saat ini konsep kedaluan itu telah punah. Awal kepunahannya adalah ketika sistem demokrasi ini masuk dalam konsep kedaluan. Saat itu, dalam konteks Manggarai, Bupati pertama diangkat dari *Dalu* (raja) yang bernama Bagoeng (Deky, 2011:21). Sejak saat itu, kedaluan sudah tidak ada karena proses pemilihan bupati berikutnya tidak berlaku sistem feodal berdasarkan garis keturunan melainkan memakai sistem demokrasi yang saat itu menerapkan demokrasi parlementer, yaitu pemilihan Bupati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sampai sekarang ini pun sistem pemilihan langsunglah yang menetapkan Bupati dan wakil bupati sehingga struktur adat yang tersisa hanya sampai pada batas kampung (*gendang*) yaitu *tu'a golo*.

V. PENUTUP

Tu'a golo adalah sebutan untuk kepala kampung dalam tatanan kebudayaan masyarakat Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tu'a golo* berarti orang yang memimpin sebuah kampung (*gendang*) untuk mengatur tata hidup sosial masyarakat agar memperoleh kesejahteraan dan kedamaian hidup. Secara umum peran tersebut berhubungan langsung dengan sistem pemerintahan tradisional Manggarai yang mencakup *pertama*, *mbaru bate kaeng* (rumah tempat tinggal); *kedua*, *uma bate duat* (kebun-*lingko* tempat bekerja), *ketiga*, *natas bate labar* (halaman kampung untuk bersosialisasi dan berkreasi); *keempat*, *wae bate teku* (mata air tempat timbaan), *kelima*, *compang bate dari* (altar persembahan).

Berkaitan dengan peran *tu'a golo* di *gendang* di Wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, semakin banyak mengalami pergeseran seiring adanya pluralitas dan diversitas aktivitas sosial yang tidak hanya terpusat pada aktivitas *mbaru gendang*. Diversitas aktivitas tersebut sangat kuat mempengaruhi peran *tu'a golo* dalam menjalankan aktivitas sosial *mbaru gendang*, pembagian *lingko* (kepemilikan lahan) dan penggerak

upacara ritual budaya dan bahkan memengaruhi cara dan syarat suksesi kepemimpinan *tu'a golo*. Perubahan peran *tu'a golo* tersebut semakin kuat dipengaruhi oleh: *pertama*, melemahnya sosialisasi karena cara dan media yang kurang *up date*; *kedua*, tumbuhnya pluralitas lembaga sosial; *ketiga*, perubahan paradigma berpikir.

Sekalipun demikian peran kepemimpinan tersebut tetap ada dalam kehidupan masyarakat gendang di wilayah Langke Rembong terutama dalam kataian dengan dua hal penting yaitu, penyelesaian batas kepemilikan lahan dan penetapan dan penggerak upacara ritual tahunan *penti*. Sekalipun demikian, ritus yang dijalakan telah diberi nilai baru yang sangat besar dipengaruhi oleh berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam konteks *peran tu'a golo* di wilayah Kecamatan Langke Rembong sangat kuat dipengaruhi oleh gerakan inkulturasi dalam Gereja Katolik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian* (edisi revisi III). Jakarta: Rineka Cipta
- Batmomolin, Lukas dan Fransisca Hermawan. *Budaya Media (Bagaimana Pesona Media Elektronik Mempengaruhi Anda)*. Ende: Nusa Indah.
- Dagur, Antonius, B. 1996. *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah satu Khasana Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press
- Deki, Teobaldus, K. 2011. *Tradisi Lisan Orang Manggarai*. Jakarta: Parrhesia institute
- Janggur, Petrus. 2008. *Butir-butir Adat Manggarai. Manggarai (Buku 1)*: Artha Gracia.
- Ganggu Aleks dan Adam Satu. 2011. "Sosiologi". Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
- Mantja, W. 2007. *Etnografi : Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Elang Mas
- Moleong, L., J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nggoro M., A. 2013. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah

- Poespowardojo, T.M. Soerjanto dan Alexander Seran. 2016. *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern dan Kontemporer*. Jakarta: Kompas.
- Ritzer, George dan Gouglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sarup, Madan. 2011. *Postrukturalisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistiowati. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

JURNAL

- Bustan, Rusman. (2009). "Peran *Tu'a Golo* Sebagai Pemimpin Tertinggi Dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai Ditinjau Dari Perspektif Linguistik Kebudayaan", *jurnal Linguistika*
- Battilana, J., & Casciaro, T. (2012). Change agents, networks, and institutions: A contingency theory of organizational change. *Academy of Management Journal*, 55(2), 381–398. <https://doi.org/10.5465/amj.2009.0891>
- Coser, a. (2011). Social Conflict and the Theory, 8(3), 197–207.

HASIL PENELITIAN

- Deki Kanisius, dkk.2017. *Ritus-ritus Adat Orang Manggarai*. Lembaga Nusa Bunga Mandiri: Ruteng.